



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONSELING/PARALEGAL PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jayapura masih sering terjadi dan peran daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan perlu dioptimalkan;
- b. bahwa perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia harus memperoleh hak atas pemulihan yang menyeluruh sejak dari tingkat kampung, kampung adat kelurahan, distrik, dan daerah sesuai kearifan lokal dan kewenangan otonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tenaga Konseling/Paralegal pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Konseling/Paralegal pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Konseling/Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Wilayah Pembangunan I, II, III dan IV sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;
 - b. bertanggung jawab atas jalannya Kegiatan Penyediaan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi, sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A); dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Tenaga Konseling/Paralegal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium Pendamping kekerasan Ahli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemula sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Pergantian Transpor Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Anak Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2022
TANGGAL 2 JUNI 2022

NAMA-NAMA TENAGA PENDAMPING PEMULA KEGIATAN PENYEDIAAN
LAYANAN RUJUKAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN
KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

NO	NAMA	UTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pdt.ABIHUD YAKADEWA	SENTANI	KONSELING
2	YEHUDA DEMETOUW	DEPAPRE	DAS YEWENA
3	OBETH RICKY A.WOUW	NIMBOKRANG	PKM NIMBOKRANG
4	AGUSTA.ANSEK KASIMAT	NIMBOKRANG	PARALEGAL
5	SUSANA SANGGRANGBANO	NIMBORAN	PARALEGAL
6	MARTINUS SUEYMALA	KEMTUK	PARALEGAL
7	ENGCELINA WAFUMILENA	DEPAPRE	PEMERHATI PEREMPUAN
8	ANIKE Y.YEWI	KEMTUK GRESI	PEMERHATI PEREMPUAN
9	YOHANA YABOISEMBUT	KEMTUK	PARALEGAL
10	NAOMI JACK	UNURUM GUAY	PARALEGAL
11	DAFIKA TAIME	SENTANI	PARALEGAL
12	Z. RINI	SENTANI	PKM SENTANI
13	SIRIA TONAPA	WAIBU	PKM KANDA
14	YOSEP HEMBRING	NAMBLONG	DAS NAMBLONG
15	FEMI VANDA MOFU	SENTANI BARAT	PKM SENTANI BARAT
16	FILEP ONGGE	SENTANI TIMUR	PARALEGAL
17	Z. RITA SADA	SENTANI TIMUR	PKM SENTANI TIMUR
18	ROSIANA ENTONG	WAIBU	PARALEGAL
19	YULIANA KELPI	UNURUM GUAY	PARALEGAL
20	AGUS PANGKATANA	WAIBU	PARALEGAL
21	MARIA SAFARIA	YAPSI	PKM YAPSI
22	DEBORA HIRWA	KAUREH	PARALEGAL
23	YOHANA YARU	KEMTUK GRESI	PARALEGAL
24	ASNAT.TIERT	SENTANI/HINEKOMBE	PEMERHATI PEREMPUAN
25	Pdt.POLOVINA RUMBINO	SENTANI BARAT	KONSELING
26	ISAK A.DODOP	DEMTA	PKM DMTA
27	SARLOTHA EYBE	DEMTA	PEMERHATI PEREMPUAN
28	ROXIE YAUNG	WAIBU	PKM WAIBU
29	FEBBY RANSAI	DEPAPRE	PKM DEPAPRE
30	TIRZANIZIA.F.HEMBRING	KAUREH	PARALEGAL
31	ANTONETHA OHE	SENTANI TIMUR	PEMERHATI PEREMPUAN
32	Pdt.ROSALINA ELUAY	YAPSI	KONSELING
33	YESAYA BANO	NIMBORAN	PARALEGAL
34	MARITJE M.NEBORE	SENTANI/ PEMDA	PARALEGAL
35	BEATRIK MEBRI	SENTANI	PEMERHATI PEREMPUAN
36	GRATIO.R	SENTANI	ADMINISTRASI
37	JUMRANA	POLRES	KONSELING
38	FRENGKI PANGKALI,SH	RESKRIM	KONSELING
39	RUT IRIANI RUMKOREM	DP3A	ADMIN SIMPONI DP3A
40	HERMIN MANDOAWALI	DP3A	BENDAHARA DP3A

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

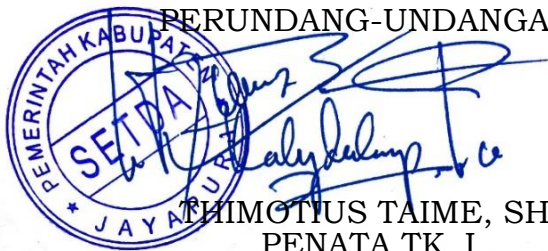
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2022
TANGGAL 2 JUNI 2022

NAMA-NAMA TENAGA AHLI PENDAMPING KEGIATAN PENYEDIAAN
LAYANAN RUJUKAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG
MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	FRANSISKA PAIKI,SH	KANIT PPA POLRES
2	NUR AIDA DUWILA,SH	LBH APIK JAYAPURA
3	SELFIANA SANGGENAFA,SH	LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PAPUA
4	Pdt.ALBERT YOKU	FKUB
5	MIRYAM Y,SOUMILENA,SE,M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	ULOH SAIFULO	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	ELFRIDA S. JAKARMILENA, S.Hut	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, POLITIK HUKUM, HAM DAN SOSIAL BUDAYA
8	KATRIANA. A. BORUMEY, S.Sos	KEPALA SEKSI PADA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, POLITIK HUKUM, HAM DAN SOSIAL BUDAYA
9	dr. MALA RISAMASU	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
10	SITI AKMIANTI,SH	KETUA LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PAPUA
11	ALFIAN HENDY,WAMEA,SH.	LBH APIK JAYAPURA
12	HERLINA TOKORO,S.Sos,M.Si	KEPALA BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK, PENELANTARAN ANAK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM
13	RIANA KAROLINA TUNGGGA	KEPALA BIDANG RAHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA
14	IVONE TRESNAWATI, S.IP,. M.H	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCACATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA
15	DELILA RUMAYOMI	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK
16	SLAMET SUBROTO	PUJAPREMA
17	RIZKI AMALIAH RACHMAN	KEPALA SEKSI
18	KALEB TABLASERAY	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN
19	Pdt.OCE AWOM	PUSAT PELATIHAN DAN PEMBINAAN WANITA JAYAPURA
20	MERLIN DEMETOUW	STAF PPA POLRES

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si